

PERKEMBANGAN GABUNGAN POLITIK INDONESIA (GAPI) PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA 1939-1942

Maretha Yolanda¹, Umi Hartati^{2*}.

^{1,2}Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro
E-mail: umihartati46@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and describe the development of the Indonesian Political Association during the Indonesian national movement in establishing parties and joining the Gapi. The research method uses historical research methods with steps such as heuristics, literature study, the validity of data collection tools and data analysis methods. The research resulted in the development of the Indonesian Political Association during the Indonesian national movement followed by various political parties that were established in Indonesia such as Parindra, Gerindo, Pasundan, PSI, and PSII. All of these parties joined Gapi, of course, to achieve the goal of the Indonesian nation that had been expected, namely Indonesia with a parliament. This is certainly an attraction for members or political parties to join the organization. Gapi's goal is to make Indonesia a parliamentary country. However, the government did various things that were intended to hinder every step taken by the nationalist figures. Therefore, there were several parties that finally followed the wishes of the Dutch by being cooperative. Characters who play a role in Gapi include Mohammad Husni Thamrin, Mr. Syarufuddin Prawiranegara, and Abikusno Cokrosuyoso who served as chairman, general writer, and treasurer. However, because of the nation's persistence towards its goals, this organization persisted until the establishment of the Indonesian People's Congress and the Indonesian People's Assembly and this organization continued to exist until Indonesia was occupied by Japan and then all political organizations in Indonesia were dissolved by the Japanese except MIAI.

Keywords: Indonesian Political Association, Development, Politics

PENDAHULUAN

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh kaum pergerakan nasional untuk merubah situasi yang sedang tidak terkendali itu menjadi sesuai dengan harapan bangsa. Sudah berabad-abad lamanya hidup di bawah negara asing yang terus bersikap semena-mena. Hingga bangsa Indonesia tersadar bahwa mereka tidak harus hidup di bawah bangsa lain. Indonesia harus memiliki struktur pemerintahan sendiri yang diatur oleh para bangsa Indonesia itu sendiri. Partai- partai politik beserta kaum pergerakan masih ada kesempatan untuk melakukan aksi bersatu hingga akhirnya muncul dengan yang disebut Petisi Soetardjo. Soetardjo mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda agar diadakan konferensi yang membahas situasi politik. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya kerjasama yang mendorong rakyat untuk memajukan negerinya dengan rencana mantap dengan sistem kebijakan politik, ekonomi dan sosial. Petisi yang ditandatangani I.J. Kasimo, Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat Tiong dapat dianggap sebagai upaya untuk keluar dari jalan sempit yang dilalui oleh para nasionalis. Menjelaskan bahwa petisi ini bukanlah suatu pengajuan untuk minta dikasihani. Ada beberapa nasionalis yang memasukan ucapan itu ke dalam hati sehingga mengurangi semangatnya.

Menurut Fajrudin Muttaqin (2015: 40), Menyatakan bahwa:

“Pada tanggal 15 Juli 1936, Soetardjo Karto Hadi Koesoemo selaku wakil PPBB dalam DR mengajukan usul petisi kepada pemerintahan agar diselenggarakan suatu konfrensi Kerajaan Belanda yang membahas status politik Hindia Belanda selama 10 tahun mendatang yaitu status otonomi di dalam batasan artikel 1 dari UUD negara Belanda.”

Hal ini menyatakan bahwa sebenarnya petisi tersebut sudah diajukan oleh Sutardjo selaku wakil PPBB dalam DR selama 2 tahun sebelum penolakan. Selama 2 tahun tersebut digantung tanpa kejelasan ataupun juga tidak memberikan alternatif lain yang semakin membuat resah masyarakat Indonesia. Dan akhirnya setelah 2 tahun barulah diberitakan bahwa pemerintah menolak Petisi Sutardjo tersebut. Tentu saja bangsa Indonesia merasakan kekecewaan yang begitu mendalam terhadap pemerintah Belanda.

Mengetahui Belanda melakukan penolakan terhadap petisi yang diajukan oleh Soetardjo membuat rakyat geram dan bertanya-tanya, mengapa pihak Belanda tidak memberikan jawaban sepatah kata pun? Sebagian mengatakan bahwa kegagalan itu karena kemauan kita kurang kuat. Dan banyak yang menyayangkan tanggapan seperti itu. Karena bagaimana juga seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan yang utuh tanpa campur tangan pihak penjajah. Namun perlu diingat bahwa kegagalan itu tidak menimbulkan reaksi di pihak pergerakan secara jelas. Memang benar perlu diketahui bahwa saat itu kekuatan para kaum pergerakan sedang dalam keadaan terikat dan sudah tidak bebas lagi bergerak dan menyuarakan pendapat secara bebas dan lepas. Mereka hanya mau menerima kenyataan dan menerima keadaan mengenai kelemahan sendiri sambil mencari jalan keluar untuk mengatasi kenyataan tersebut walaupun itu bukanlah keinginan yang sebenarnya. Aksi besar-besaran tidak tampak dan PPPKI yang sudah ada ternyata tidak mampu menyusun kekuatan yang baru.

Untuk mengatasi keadaan yang semakin tak terkendali ini diperlukannya jalan keluar. Kemudian Muhammad Husni Thamrin mendapatkan petunjuk dengan membentuk suatu organisasi GAPI pada tanggal 21 Mei 1939. Organisasi ini adalah gabungan dari Parindra, Gerindo, Partai Islam Indonesia, Pasundan, dan PSII. Dari begitu banyaknya partai yang tegabung dengan jelas bahwa organisasi ini menginginkan suatu kekuatan nasional yang baru yang lebih berani bergerak bersama dari pada bergerak sendiri-sendiri. Itu semua adalah dorongan dari dalam yang ingin membentuk kekuatan bersama massa, sedangkan dorongan dari luar berupa ancaman perang yang segera timbul karena Jepang sudah mulai bergerak ke Selatan, ke arah Indonesia. Sementara, ada kelompok lain yang berusaha membentuk badan persatuan, yang diprakarsai oleh Moh. Yamin, Rasjid, dan Tadjoeedi Noer. Mereka merasakan bahwa dalam perkembangan politik di lingkungan dan diluar memperjuangkan kepentingan daerah-daerah itu dibentuk badan atau organisasi yang disebut Golongan Nasional Indonesia (GNI) pada bulan Juli 1939.

Baik Gapi maupun GNI mereka sama-sama memiliki tujuan Indonesia merdeka dari belenggu penjajah. Mereka menginginkan negara yang utuh, negara yang berparlemen, negara yang merdeka dengan pemimpin yang adil dalam mensejahterakan rakyatnya. Walaupun mereka adalah dua wadah yang berbeda dengan kepala yang berbeda mereka tetap menjunjung tinggi harapan merdeka untuk Indonesia. Melalui urgensi penelitian ini peneliti mencoba melakukan penelitian terhadap organisasi ini karena menurut peneliti Gapi merupakan organisasi pertama yang menaungi beberapa partai politik di dalamnya guna untuk bersama mencapai cita-cita. Peneliti juga tertarik dengan partai-partai yang bergabung dengan Gapi ini. Banyak partai yang ikut serta bergabung bersatu bersinergi dengan Gapi untuk mencapai Indonesia yang berparlemen.

Jadi, peneliti mengkaji “Perkembangan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) Pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1939-1942” karena Gapi merupakan salah satu faktor timbulnya kemerdekaan Indonesia, dan perkembangan Gapi dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu organisasi pelopor kemerdekaan perlu dikaji lebih lanjut lagi supaya pembaca lebih memahami tentang perkembangan Gapi itu sendiri sebagai salah satu organisasi yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia.

METODE

Dalam penelitian atau penulisan sejarah, memang sangat diperlukan suatu metode agar efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode historis (Daliman, 2012: 27). Dengan kata lain peneliti mendeskripsikan gejala, namun tidak satu waktu dengan penelitian yang dilakukan. Dalam metode penelitian harus melalui beberapa tahap. Yaitu mencari dan mengumpulkan sumber-sumber dari berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa sejarah yang relevan dengan judul penelitian yang akan kita teliti. Kemudian data tersebut dikumpulkan dan dibedakan anatar sumber sejarah primer dan sumber sejarah primer. Sumber sejarah primer merupakan sumber sejarah yang sejaman antara peristiwa yang sedang terjadi dengan penulisan sumber sejarah tersebut. Sebagai contoh dari sumber sejarah primer adalah seperti arsip, catatan perjalanan, daftar hadir sebuah rapat, hasil tertulis dari sebuah rapat, surat keputusan dan lain sebagainya. Sedangkan sumber sejarah sekunder merupakan sumber sejarah yang ditulis tidak sejaman dengan peristiwa sejarah yang sedang terjadi. Sebagai contoh dari sumber sejarah sekunder adalah buku-buku sejarah. Setelah beberapa tahap dilakukan oleh peneliti setelah itu peneliti menulis sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemerdekaan suatu bangsa dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan yang terus berjuang tanpa henti. Di bawah naungan sebuah badan organisasi yang mampu menampung aspirasi yang diinginkan guna akan disampaikan kepada Pemerintah Belanda untuk mewujudkan kemerdekaan serta berdirinya parlemen untuk Indonesia. Organisasi Gapi (Gabungan Politik Indonesia) merupakan badan yang menaungi beberapa partai politik yang tergabung di dalamnya yang sama-sama bersinergi untuk mewujudkan kemerdekaan dan Indonesia Berparlemen.

Terbentuknya Gapi

Pada tanggal 15 Juli 1936, Sutardjo Kartohadikusumo mengajukan sebuah petisi kepada pemerintahan Belanda agar diselenggarakannya sebuah konferensi yang membahas status politik di Indonesia. Sutardjo menganggap bahwa kerjasama antara Indonesia dan pemerintah Belanda sangat dibutuhkan agar tidak ada yang saling rugi dan merugikan. Isi petisi ialah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dimana anggota-

anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas Pasal Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda (Poseponegoro dan Marwati Djoened, 2010: 385).

Isi petisi ini merupakan suatu permohonan agar diselenggarakannya musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan wakil-wakil Belanda. Tujuannya untuk menyusun suatu rencana pembentukan suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam Undang-Undang Dasar Belanda. Pelaksanaannya akan berangsur-angsur selama sepuluh tahun dalam waktu yang telah ditentukan dalam sidang pers Belanda. Pengajuan petisi ini banyak diklaim oleh para pribumi sebagai bentuk meminta-minta suatu kemerdekaan dari Pemerintah Belanda. Namun bagi pribumi lain menganggap bahwa ini merupakan suatu tindakan yang dapat mengurangi perjuangan bagi rakyat.

Sambil menunggu keputusan dari pemerintah Belanda diterima atau tidaknya petisi tersebut, maka diadakan persidangan Volksraad pada bulan Juli 1937, Sutardjo kembali mengajukan usul "Indonesia Berdiri Sendiri". Keputusan penolakan Petisi Sutardjo itu sangat mengecewakan para pemimpin nasional. Lebih-lebih jika dilihat dari lamanya petisi itu menggantung sampai dua tahun baru diberitahukan penolakan, yang sudah barang tentu mengecewakan barisan nasional. (Suhartono, 2001: 94). Petisi Sutardjo mengalami penggantungan sebelum akhirnya diumumkan bahwa Pemerintah Belanda menolaknya. Tentu hal itu sangat mengecewakan rakyat Indonesia. Karena sudah menunggu kemudian terjadi penolakan. Juga membuat semangat para pejuang melemah dalam hal pergerakan nasional.

Sebagian mengatakan bahwa kegagalan itu karena kemauan rakyat kurang kuat dan kurang yakin dengan petisi tersebut. Mereka hanya mau menerima kenyataan dan menerima keadaan mengenai kelemahan sendiri sambil mencari jalan keluar untuk mengatasinya.

Setelah jelas Petisi Sutardjo itu ditolak oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 16 November 1938 keadaan mulai tampak akan adanya tanda-tanda terjadinya perang besar antara pihak Sekutu dengan fasis (Nazi). Jika memang perang besar itu akan terjadi, seharusnya Pemerintah Belanda mengikutsertakan tenaga Indonesia dalam perang tersebut. Namun mereka menganggap bahwa tanpa bantuan tenaga dari rakyat Indonesia mereka mampu memenangkan perang tersebut. Karena mereka mengandalkan kekuatan pasukan gabungan Amerika, British, Cina, Dutch, dan Australia. Padahal ketika itu pasukan gabungan tersebut masih belum teruji kemampuannya dan juga belum diatur dalam komando tunggal. Dan juga dibandingkan dengan perlengkapan yang dimiliki fasis (Nazi) perlengkapan dan peralatan yang dimiliki Belanda sangat ketinggalan (Sudiyo, 2004). Mereka juga menganggap dengan pasukan yang dimilikinya bersama pasukan gabungan mampu melindungi rakyat Indonesia dari perang besar tersebut.

Di dalam perjalanannya pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia menempuh jalan untuk mempersatukan tenaga seluruh kaum terjajah untuk menghadap para penjajah dan memperoleh kemerdekaan. Dalam keadaan seperti ini para pemimpin pergerakan bangsa mengadakan kooperasi dengan pemerintah disertai dengan gerakan rakyat yang mendukung. Berhubungan dengan

kegentingan Internasional timbullah satu badan baru bagi persatuan yang diberi nama Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada tanggal 21 Mei 1939. Sesudah lebih dari empat tahun lamanya tidak beraksi, dalam hal ini PPPKI itu dengan diam-diam mati adanya maka berhubungan dengan kegentingan internasional yang menyebabkan sangat perlunya pemusatan tenaga bangsa Indonesia lahir dan batin, timbullah satu badan baru bagi persatuan, bernama Gabungan Politik Indonesia (Gapi); tujuannya ialah mempersatukan semua partai politik Indonesia Raya (Pringgodigdo, 1986: 145).

Kemudian Kongres Rakyat Indonesia yang diadakan oleh Gapi di Jakarta 23-25 Desember 1939 yang dihadiri oleh perkumpulan yang bukan politik seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang terpenting adalah untuk membicarakan "Indonesia Berparlemen".

Gapi kemudian mengadakan konferensi pada Desember 1939. Dalam konferensi ini diambil keputusan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang cita-cita Gapi dalam hal Indonesia Berparlemen untuk dipropagandakan oleh semua komite yang ada. Yang membuat rancangan penjelasan dibebankan kepada sekretariat Gapi, yaitu Abikusno Cokrosuyoso dari Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) sebagai penulis umum, Dr. A.K. Gani dari Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) sebagai penulis kedua, Sukardjo Wiryopranoto dari Partai Indonesia Raya (Parindra) sebagai bendahara, Mr. Sartono dari Gerindo dan

M.H. Thamrin dari Parindra.

M. H. Thamrin Pada zaman pergerakan nasional M. H. Thamrin muncul sebagai salah satu tokoh pemimpin pergerakan yang patut untuk ditiru dan disegani perilakunya. Karena M. H. Thamrin memiliki riwayat politikus yang cukup matang dan tidak bisa dipisahkan dari situasi pada saat itu. Kiprahnya di dunia politik, M. H. Thamrin mampu menyesuaikan dengan situasinya untuk kembali mengambil kemerdekaan yang telah dirampas oleh Belanda. Pada zaman itu M. H. Thamrin muncul dalam sebagai tokoh pergerakan nasional. M.H. Thamrin merupakan ketua dari Gapi. Ia memiliki mosi yang mengusulkan untuk mengganti istilah-istilah Belanda dengan istilah Indonesia khususnya dalam dokumen pemerintahan.

1. Mr. Amir Syarifuddin Prawiranegara

Mr. Amir Syarifuddin lahir di Serang, Banten pada tanggal 28 Februari 1911 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1989 (77 tahun). Beliau merupakan seorang pejuang kemerdekaan, Menteri, Gubernur, Wakil Perdana Menteri dan pernah menjabat sebagai Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pada tahun 1939-1940 Syarifuddin menjadi editor pada sebuah majalah *Soeara Timoer* yang disponsori oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo. Setelah kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Badan Pekerja KNIP yang bertugas sebagai badan legislative di Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR. KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis Besar Haluan Negara.

2. Abikusno Cokrosuyoso

Abikusno Cokrosuyoso lahir di kota Karang Anyar, Kebumen pada tahun 1897 dan meninggal pada tahun 1968. Beliau merupakan salah satu Bapak Pendiri Kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan anggota

Panitia Sembilan yang merancang pembukaan UUD 1945 (Piagam Jakarta). Setelah kemerdekaan ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Presidensial pertama Soekarno. Kakak Abikusno Cokrosuyoso adalah Umar Said Cokroaminoto pemimpin pertama Sarekat Islam. Setelah kematian saudaranya pada tahun 1934 Abikusno mewarisi jabatan sebagai pemimpin PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia). Bersama dengan M. H. Thamrin dan Mr. Syarifuddin, Abikusno Cokrosuyoso ikut membentuk Gapi. Mereka menawarkan dukungan penuh kepada otoritas pemerintahan kolonial Belanda dalam hal pertahanan untuk melawan Jepang.

KESIMPULAN

Pergerakan nasional muncul pada awal tahun 1908 yang ditandai dengan berdirinya organisasi pertama yang diberi nama Budi Utomo. Munculnya pergerakan nasional ini juga terjadi beberapa faktor yang diantaranya terjadi karena faktor internal dan eksternal. Organisasi yang awal berdiri pada awal masa pergerakan diantaranya ada Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, dan Indische Partij. Kemudian disusul partai-partai lain yang bermunculan yang bergerak pada bidang sosial dan budaya. Jarang dari mereka yang lahir dan langsung bergerak ke kiprah politik karena akan membuat pemerintah Belanda curiga dan akan menjadi pusat perhatiannya. Yang kemudian lahirlah sebuah organisasi Gabungan Politik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1939 pada rapat Parindra dan diketuai oleh Moh. Husni Thamrin.

SARAN

Di dalam penelitian ini banyak yang sudah dibahas mengenai Gabungan Politik Indonesia diantaranya ialah Petisi Sutardjo, Terbentuknya Gapi, Perkembangan Gapi, Anggota Gapi, Partai-partai yang Terlibat, sampai dengan tranfromasi Gapi. Banyak yang sudah dibahas, semoga menjadi rujukan tambahan bagi para pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Surjomiharjo. 1979. *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi*. Idayu. Jakarta
- Budiardjo, Meriam. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta Daliman. 2020.
- Metode Penelitian Sejarah*. Ombak. Yogyakarta Fajdrudin. 2015. *Sejarah Pergerakan Nasional*. Humaniora. Bandung Hamid, ABD Rahman. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Ombak. Yogyakarta
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Noer, Deliar. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Rajawali. Jakarta Pringgodigdo, A. K. 1986. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Dian Rakyat. Jakarta
- Pringgodigdo, A. K. 1991. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Dian Rakyat. Jakarta

Ricklefs, MC. 1200-2008. *Sejarah Indonesia Modern*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

Sartono Kartodirdjo. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Gramedia. Jakarta.

Sartono Kartodirdjo. 2014. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Ombak. Yogyakarta.

Sudiyo. 2004. *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. Rineka Cipta. Jakarta

Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.